

Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah



Workshop Pengendalian dan Evaluasi SKPD Provinsi Banten 2015
Hotel Ratu Bidakara-Serang, 28 Mei 2015





Dadang Solihin

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah *Senior Strategic Planner* pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Prinsip Monitoring dan Evaluasi
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
 - Ruang Lingkup SPPN
 - RPJM Daerah
 - Peraturan terkait Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah
 - Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
 - Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN
 - Perangkat Pelaksanaan Penyelarasan
 - Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 - Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam *Multilateral Meeting*

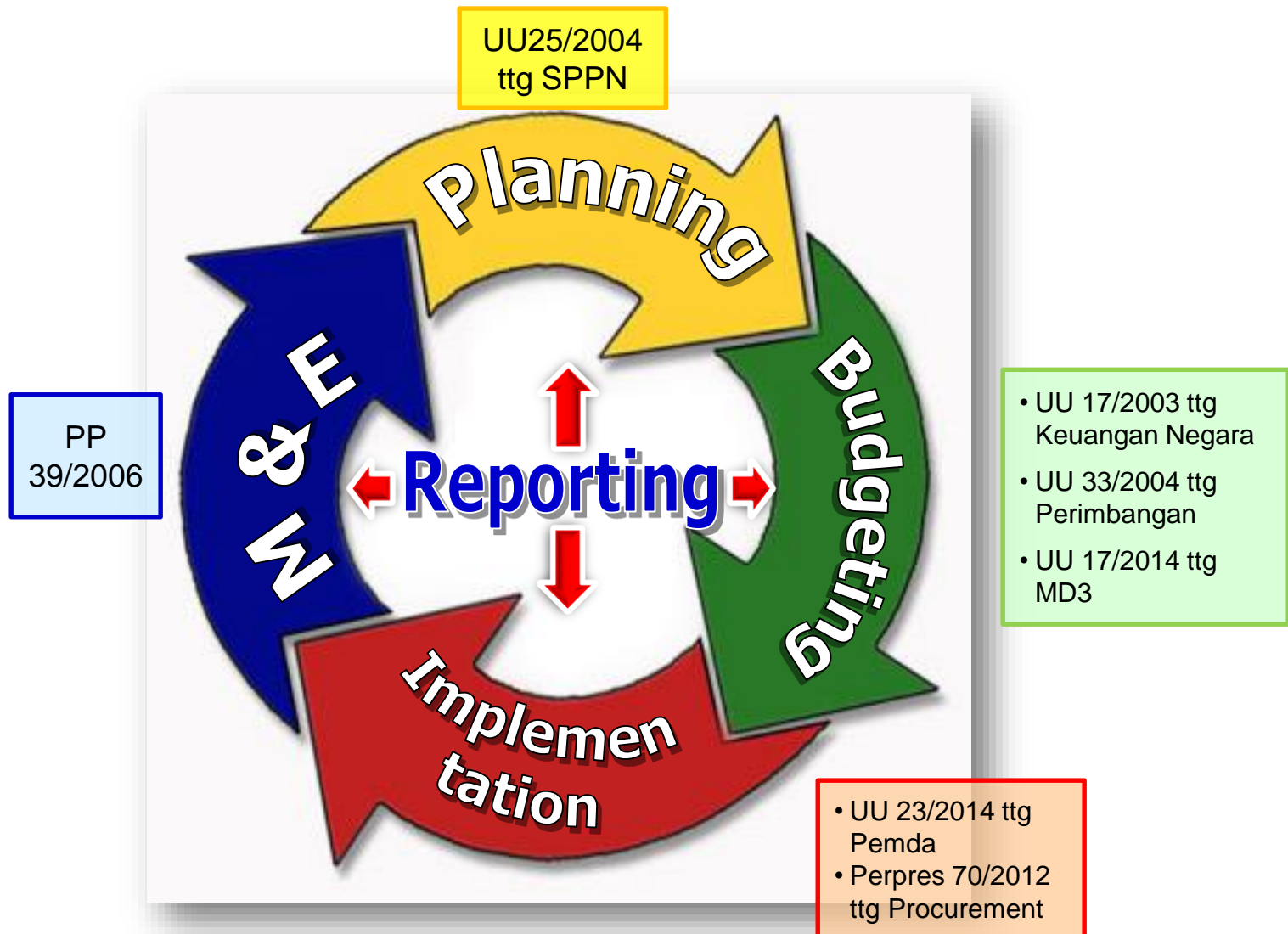


Prinsip Monitoring dan Evaluasi

UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYAS

Menggabungkan M&E

ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan



Kedudukan Money dalam Perencanaan

Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Definisi Monitoring



- **Monitoring** secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain:
 - Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output)
 - Pelaporan tentang kemajuan
 - Identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.

Definisi Evaluasi



- Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
- Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)

Jenis Evaluasi

menurut waktu pelaksanaan



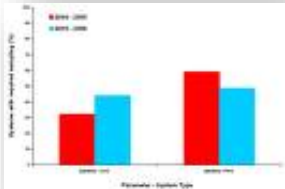
Tahap Perencanaan (*ex-ante*):

- dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan
- untuk memilih dan menentukan:
 1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya



Tahap Pelaksanaan (*on-going*):

- Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
- Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
- Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program



Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*):

- dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
- untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
- untuk menilai:
 1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Mengapa Perlu Monev

- Review perkembangan/progress
- Identifikasi masalah dalam perencanaan dan/atau implementasi
- Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
- Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
- Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah
- Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
- Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya
- Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
- Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:



✓ Strategi

Apakah yang dilakukan sudah benar?



✓ Operasi

Apakah cara yang ditempuh sudah benar?



✓ Pembelajaran

Apakah ada cara yang lebih baik?

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

Aspek	Monitoring	Evaluasi
Tujuan	Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan	Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program
Fokus	<ul style="list-style-type: none">• Akuntabilitas penyampaian input program• Dasar untuk aksi perbaikan• Penilaian keberlanjutan program	<ul style="list-style-type: none">• Akuntabilitas penggunaan sumber daya• Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang
Cakupan	<ul style="list-style-type: none">• Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?• Apakah terdapat penyimpangan?• Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?	<ul style="list-style-type: none">• Relevansi• Keberhasilan• Efektifitas biaya• Pembelajaran
Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan terus menerus atau secara berkala selama pelaksanaan program	Umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program

Fokus Monev

- monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, dengan memfokuskan pada:
 - **Efisiensi** menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah sesuai dengan output yang dihasilkan
 - **Efektifitas** ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan
 - **Impact** menggambarkan apakah yang telah dilakukan memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin diselesaikan

Pertanyaan Kunci Monitoring

1. Masalah apa yang timbul ?
2. Apakah proyek berjalan sesuai jadwal ?
3. Apakah proyek menghasilkan Output yang direncanakan ?
4. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana ?
5. Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana?
6. Apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas proyek ?

Tujuan Monitoring

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Tujuan Evaluasi

- **Tujuan etis.** Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika politik dan penegakkan demokrasi.
- **Tujuan manajerial.** Mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda dan meningkatkan manajemen layanan publik.
- **Tujuan keputusan.** Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan.
- **Tujuan pendidikan dan motivasi.** Mendidik dan memotivasi pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri.

Jenis Evaluasi

1. Evaluasi Formatif

- Evaluasi yang fokus pada kinerja yang lebih baik (kebijakan, program atau kegiatan).
- Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap.

2. Evaluasi Sumatif

- Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat).
- Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang kegunaan sebuah program.

Jenis Evaluasi

3. Evaluasi Prospektif.

- Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan:
 - Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus evaluasi?
 - Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau sumberdaya yang digunakan?
- Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil monitoring (*monitoring*) dan penilaian dari studi awal untuk menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan, program atau kegiatan yang baru diusulkan.

Jenis Evaluasi menurut tujuan



- **Evaluasi proses:**

Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).



- **Evaluasi biaya-manfaat:**

Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.



- **Evaluasi dampak:**

Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat, & kelembagaan.

Tipe Evaluator

1. Evaluator Internal

- Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan dan sebagainya.
- Menyatu dengan obyek yang dievaluasi.

2. Evaluator Eksternal

- Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik.
- Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan.

3. Evaluator Partisipatif

- Wakil dari pemerintah dan *stakeholders* (termasuk penerima manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan evaluasi.
- Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi internal dan eksternal.

Evaluasi Internal dan External

	Kelebihan	Kekurangan
Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none">• Evaluator cukup mengenal dengan lingkungan yang dievaluasi• Beberapa responden lebih mudah digali informasinya oleh orang dalam daripada orang luar• Biaya lebih rendah dibanding eksternal	<ul style="list-style-type: none">• Objektivitas tim evaluasi terhadap hasil evaluasi mungkin dapat dipengaruhi berbagai kepentingan• Tim evaluasi mungkin kurang terlatih atau memiliki kemampuan dalam bidang evaluasi
Evaluasi Eksternal	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi dapat lebih objektif• Evaluator memiliki kemampuan dan keterampilan lebih dalam bidang evaluasi• Beberapa responden lebih mudah digali informasi oleh orang luar• Menggunakan evaluator eksternal dapat memberikan kredibilitas lebih terhadap hasil temuan	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi eksternal dapat memakan biaya yang besar• Evaluator eksternal mungkin salah mengerti keinginan kita terhadap apa yang ingin dievaluasi

Tahapan Evaluasi

1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi
 - Identifikasi program/kegiatan/objek yang akan dievaluasi
 - Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi
 - Tentukan fokus yang menjadi perhatian s.d informasinya
2. Menyusun rencana evaluasi
 - Susun pertanyaan evaluasi
 - Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan
 - Tentukan kriteria evaluasi
 - Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi didapat
 - Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi

Tahapan Evaluasi

3. Pengumpulan data
 - Identifikasi informasi
 - Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi
 - Pilot test untuk menguji instrumen
 - Susun kembali instrumen sebagai perbaikan
4. Analisis dan presentasi data
 - Susun metode analisis dan presentasi data
 - Buat kesimpulan analisis
 - Buat laporan hasil evaluasi
 - Presentasikan dan laporkan secara tertulis
5. Pengambilan keputusan
 - Tentukan pilihan rekomendasi
 - Identifikasi area evaluasi

Perbedaan Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan Utama	Fokus Pertanyaan	Metodologi
Goal-based	Menilai pencapaian tujuan dan sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Apakah tujuan tercapai? Efisienkah?• Apakah tujuan tersebut sudah sesuai?	Membandingkan baseline dan progres data, menemukan cara-cara dalam mengukur indikator
Decision making	Memberikan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Apakah program efektif?• Perlukah dilanjutkan?• Bagaimana jika program tsb dimodifikasi?	<ul style="list-style-type: none">• Menilai kisaran opsi yang terkait dengan konteks proyek, input, proses dan hasil.• Membuat beberapa cara konsensus pengambilan keputusan
Goal-free	Menilai keseluruhan efek dari proyek baik yang diinginkan maupun yang tidak	<ul style="list-style-type: none">• Apakah hasil keseluruhan dari proyek?• Nilai-nilai apakah yang terdapat disana?	<ul style="list-style-type: none">• Determinasi independen akan kebutuhan dan ukuran dalam menilai kelayakan proyek.• Teknik kualitatif dan kuantitatif dalam menemukan berbagai kemungkinan hasil.
Expert judgement	Penggunaan keahlian	Bagaimana ahli external menilai proyek ini?	Review kritis berdasarkan pengalaman, survey informal dan wawasan mendalam yang subjektif

Kerangka Konseptual Evaluasi

- Menjadi bagian dari **desain program**
- **Perencanaan** yg baik sejak awal
- **Dukungan** dari pemangku kepentingan
- Menjadi bagian dari **tanggung jawab** pemimpin program
- Alokasi **sumber daya** yg memadai

Kriteria Evaluasi

▪ Relevansi	Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
▪ Efektifitas	Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
▪ Efisiensi	Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
▪ Dampak	Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
▪ Keberlanjutan	Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.



Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJM Daerah

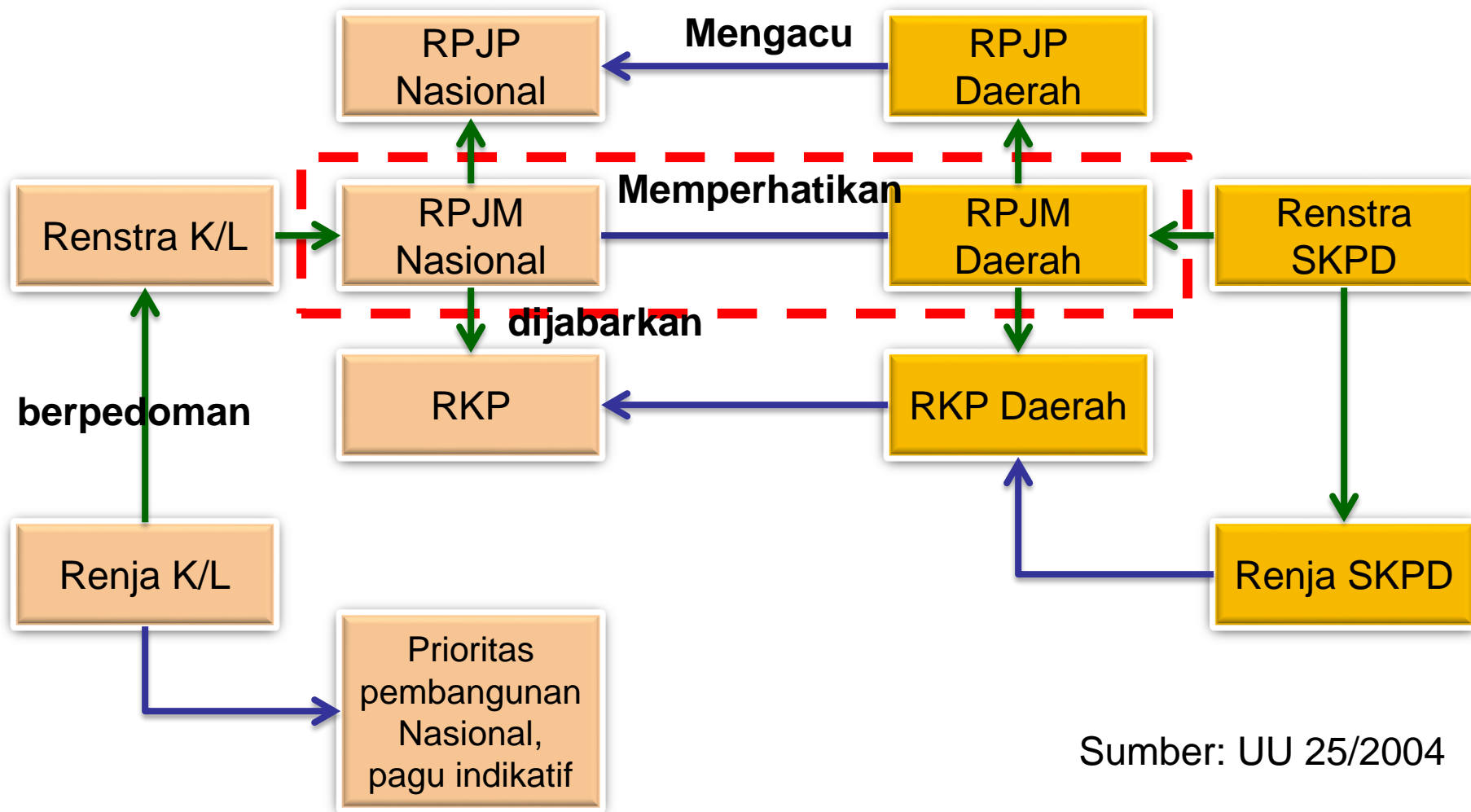
- **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
- yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**,
- memuat:
 1. arah kebijakan keuangan Daerah,
 2. strategi pembangunan Daerah,
 3. kebijakan umum, dan
 4. program SKPD, lintas SKPD, dan
 5. program kewilayahan
- disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Peraturan terkait Penyelarasan RPJMN dan RPJMD

No	Peraturan	SPPN	Pemerintahan Daerah
1.	Undang-Undang	UU 25/2004	<ul style="list-style-type: none">• UU 32/2004• UU 23/2014
2.	Peraturan Pemerintah	PP 40/2006	PP 8/2008
3.	Peraturan Menteri	Permen PPN 1/2014	Permendagri 54/2010
4.	Surat Edaran Bersama	0199/M PPN/04/2010	28/2010
5.	Peraturan lainnya	Juklak Sesmen PPN No. 3/Juklak/Sesmen/06/2014	

Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: UU 25/2004

Kerangka RPJMD



1. Arah kebijakan keuangan daerah
2. Strategi pembangunan daerah
3. Kebijakan umum
4. Program satuan kerja perangkat daerah
5. Program lintas satuan kerja perangkat daerah,
6. Program kewilayahan
7. Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Fungsi RPJMN

- RPJM Nasional berfungsi sebagai:
 1. Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan
 2. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional



Sumber: Pasal 17 PP 40/2006

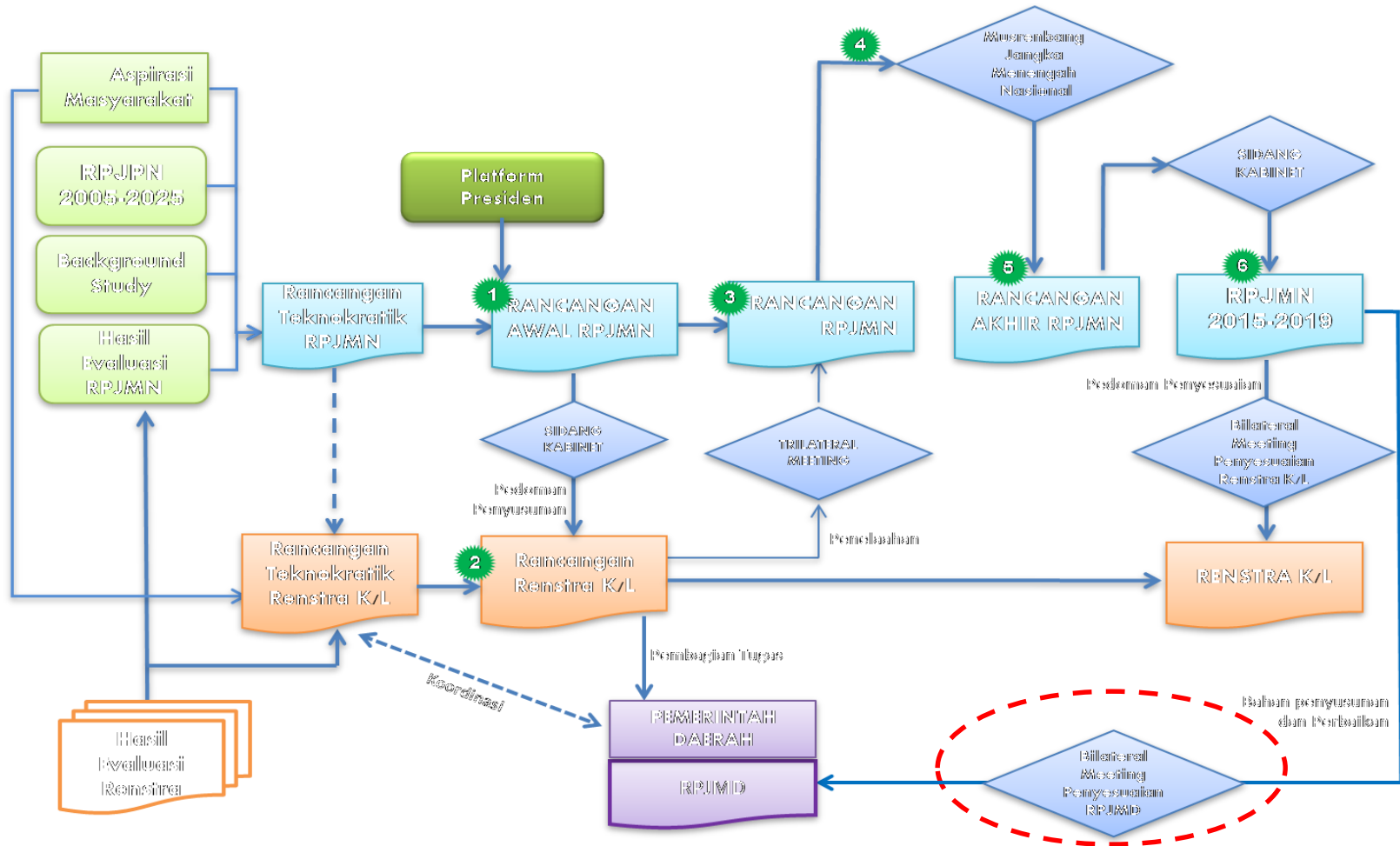
Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN



- Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui **Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD** dengan RPJMN 2015-2019.

Sumber: Pasal 14 Permen PPN 1/2014

Alur Penyusunan RPJMN



Sumber: Juklak Sesmen PPN 3/2014

Bilateral Meeting

- **Bilateral Meeting** Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing **program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional**, penyesuaian target dan pendanaannya.



RPJMD tidak mengatur kegiatan pokok di dalamnya

Sumber: Pasal 1 Permen PPN 1/2014

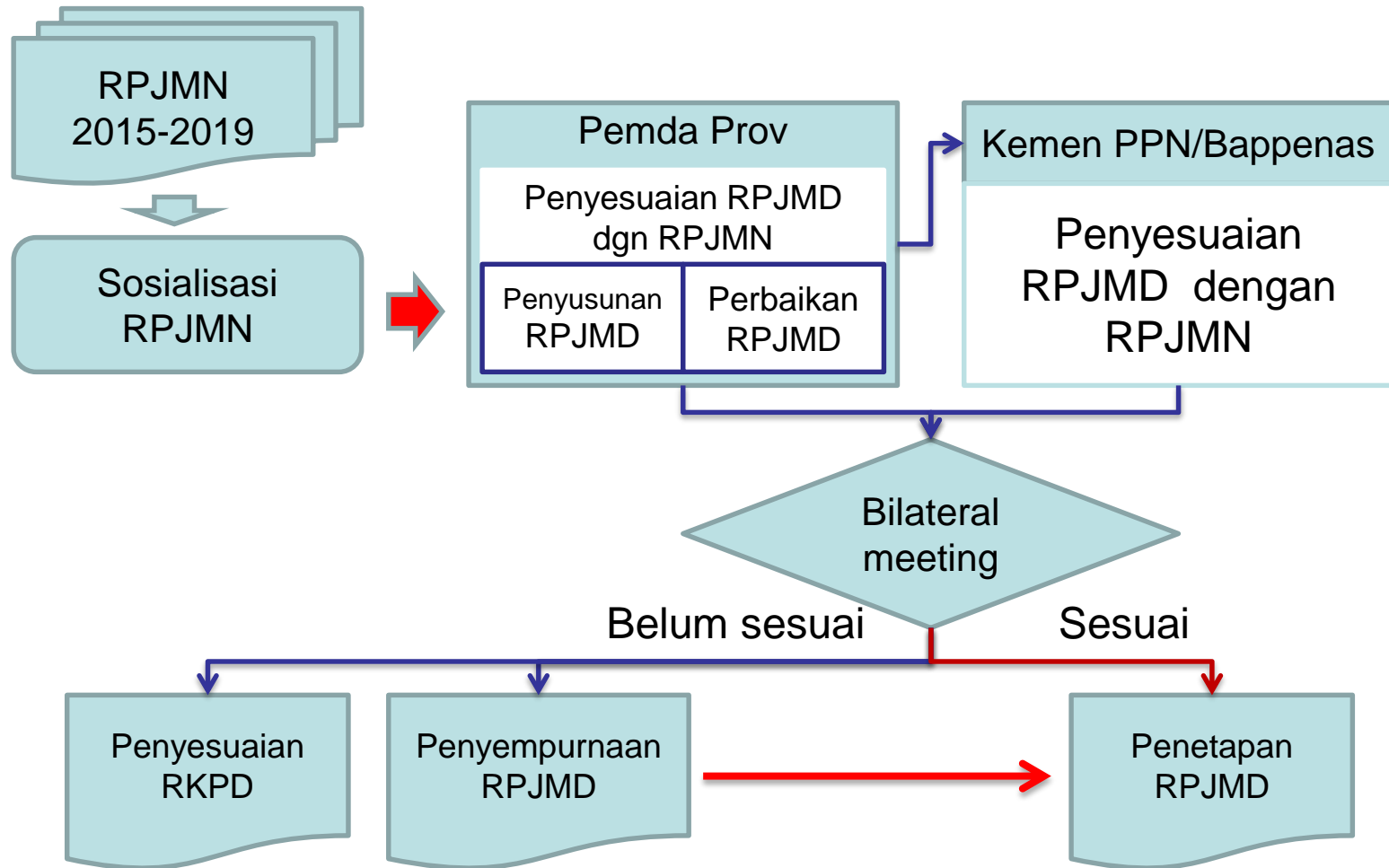
Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



- Tujuan Penyesuaian RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2015-2019:
 1. Menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait.
 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

- Penyesuaian RPJMD kepada RPJMN:
 1. Konsistensi Sasaran Pokok RPJMD dengan Sasaran Pokok Nasional
 2. Konsistensi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah mendukung pencapaian Prioritas Nasional
 3. Penyesuaian Target RPJMD dengan Target Prioritas Nasional Terkait
 4. Penyesuaian Pendanaan yang Dialokasikan
- Khusus untuk kegiatan strategis nasional, RPJMD harus menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Perencanaan Pembangunan Daerah



- Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diselarasankan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah

Sumber: Pasal 260 UU 23/2014

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat :
 1. tujuan,
 2. sasaran,
 3. strategi,
 4. Arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
 5. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
 6. indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 7. dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sumber: Pasal 263 UU 23/2014

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan

- RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



Dasar Hukum Perubahan RPJMD untuk
Penyelarasan terhadap RPJMD

Sumber: Pasal 264 UU 23/2014

Evaluasi Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan

- Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri (*Mendagri*) dilaksanakan untuk
 - menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN,
 - kepentingan umum dan/atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



Diperuntukkan bagi RPJMD baru, sedangkan belum ada aturan bagi RPJMD eksisting

Sumber: Pasal 269 UU 23/2014

Keselarasan RPJMD dan RPJM

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Bab VI RPJMD)



Strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VII)



Pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;

Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VIII)



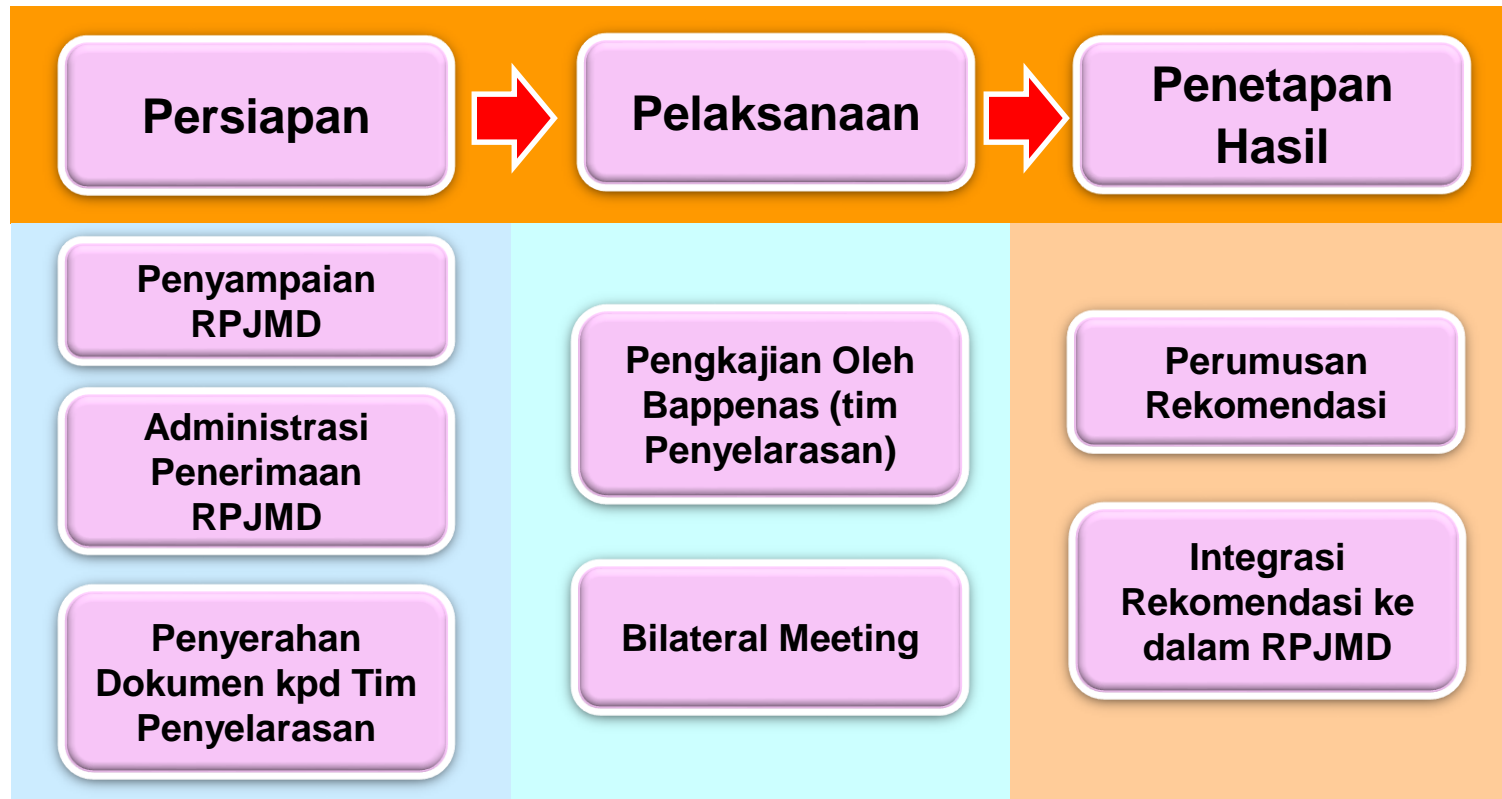
Pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Sumber: Pasal 3 SEB 3 Menteri/2010

Perangkat Pelaksanaan Penyelarasan



Tahapan Pelaksanaan



Ruang Lingkup Penyelarasan



Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Penyelarasan Strategi

- Penyelarasan Strategi (RPJMD) terhadap Tema Pengembangan Wilayah (RJMN)

Wilayah	Tema Pengembangan	Strategi Pembangunan Daerah
Papua	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;• Dst ...	
Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional• Dst ...	
dst...		

Penyelarasan Arah Kebijakan

- Penyelarasan arah kebijakan (RPJMD) terhadap Tujuan pengembangan wilayah (RPJMN)

Wilayah	Tujuan Pengembangan	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara	a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga; b. penyediaan infrastruktur wilayah; c. dst	
Sulawesi	a. pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari; b. dst	
Sumatera	a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; b. Dst...	
Dst...		



Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Banten

Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Revitalisasi Jaringan KA Rangkasbitung-Saketi-Malimping-Bayah2. Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Labuhan3. Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak4. Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara5. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan6. Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul	

PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="48 406 1348 535">1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tangerang*<li data-bbox="48 549 1348 678">2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tangerang Selatan*<li data-bbox="48 692 1348 821">3. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Serang*	

PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD
1. Pembangunan Terminal 3 dan Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta 2. Pembangunan Bandara Banten Selatan	

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD
1. Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara	

JALAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalan Cikande - Rangkasbitung2. Pembangunan Jalan Cikande – Serang – Cilegon3. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung banten - Bayah4. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km)5. Pembangunan Jalan Tol Serpong- Balaraja6. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Banten	

ASDP

RPJMN	RPJMD
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 7 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 4	

KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. PLTU Jawa-5 2000 MW2. PLTU Jawa-7 2x1000 MW3. PLTU Jawa-9 600 MW4. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 3 500 MW5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI	

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Waduk Sindang Heula Kab. Serang2. Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak3. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air Bendung Pasar Baru Tangerang4. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisadane5. Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teluk Lada	

PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan gedung untuk peningkatan akses pendidikan menengah SMA/SMK (lebak, pandeglang dan Kab.Serang)2. Pembukaan akademi komunitas/politeknik jurusan industri logam, petrokimia, alas kaki, makanan, dan tekstil3. Pengembangan pembangunan kampus baru Untirta4. Pengembangan fakultas kedokteran Untirta	

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan RS rujukan regional Banten2. Pengembangan RS tipe D (RS Malimping)3. Pembangunan RS Jiwa Banten4. Pembangunan pusat rehabilitasi narkoba5. Peningkatan screening dan pengobatan pasien HIV dan AIDS6. Penguatan program KB7. Peningkatan jumlah PLKB8. Penguatan kelembagaan khusus yang menangani kependudukan dan KB	

PERUMAHAN

RPJMN	RPJMD
<ol style="list-style-type: none">1. SPAM wilayah Serang, dan wilayah Tangerang2. Penanganan kawasan kumuh Kota Tangerang, Kabupaten tangerang, dan Kab Tangsel, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab Serang3. Penataan kawasan Banten Lama	

Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Kawasan Perbatasan



1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; **Pemda**

Kemendag;
Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda

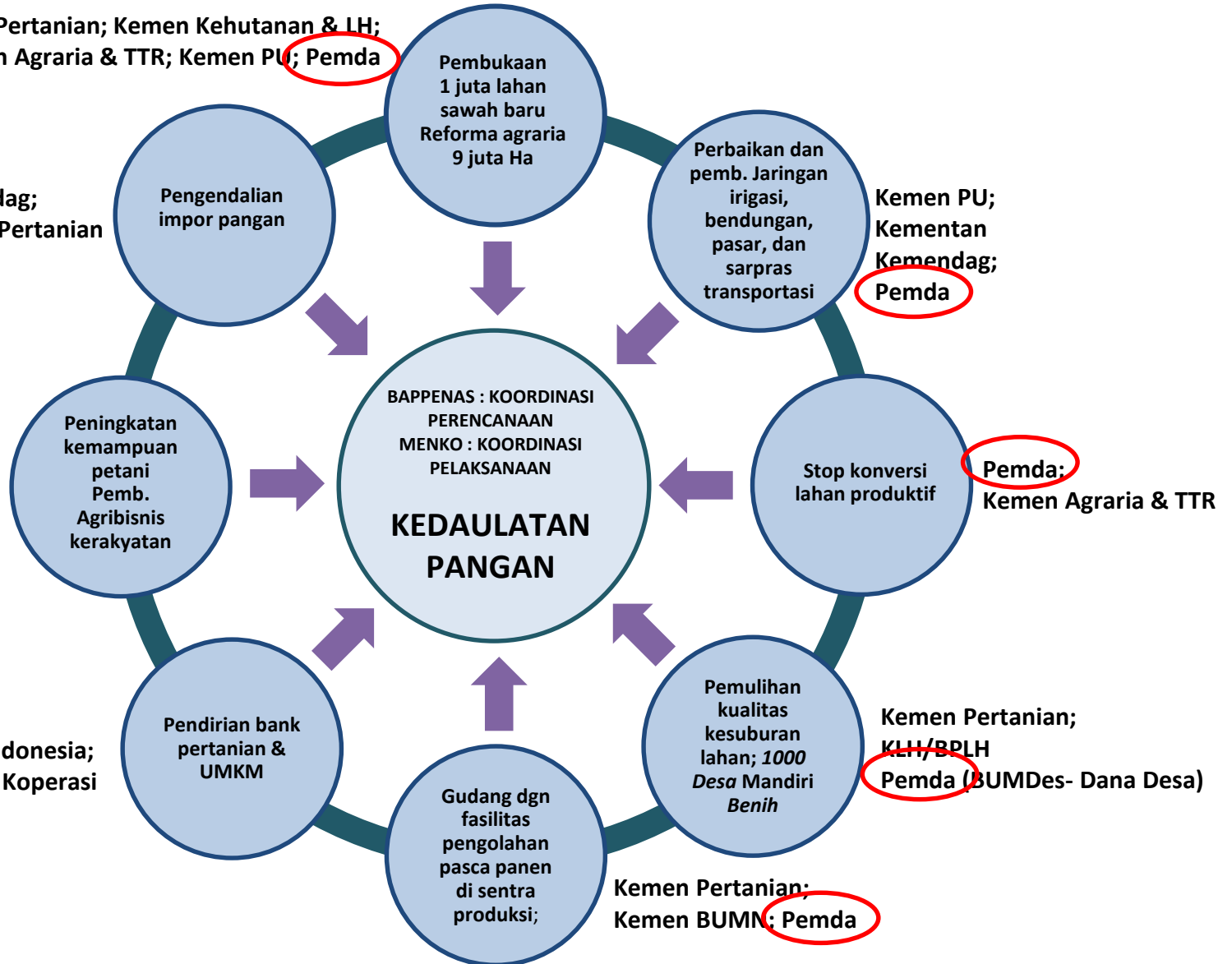
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; **Pemda**

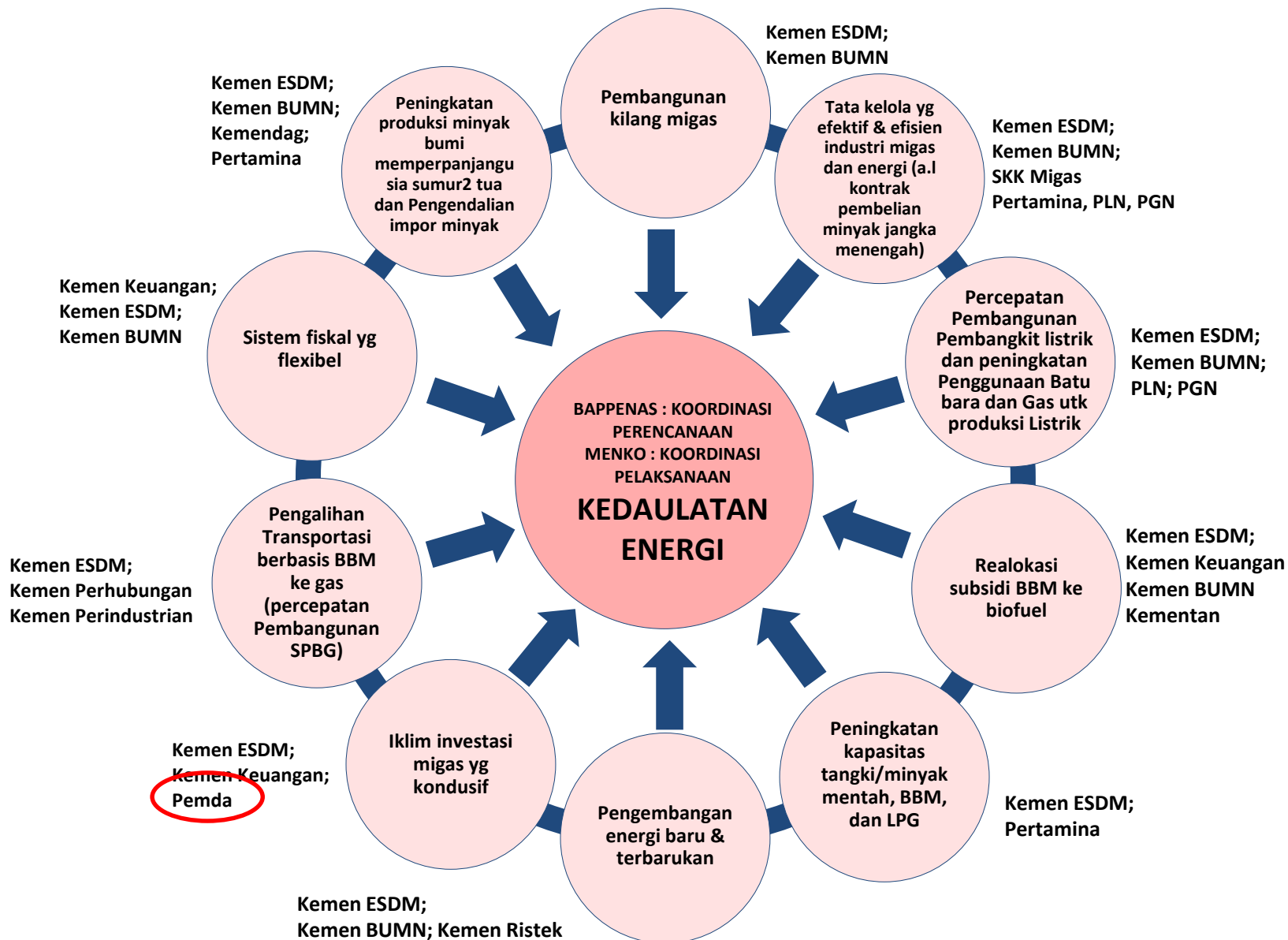
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda

Pemda;
Kemen Agraria & TTR

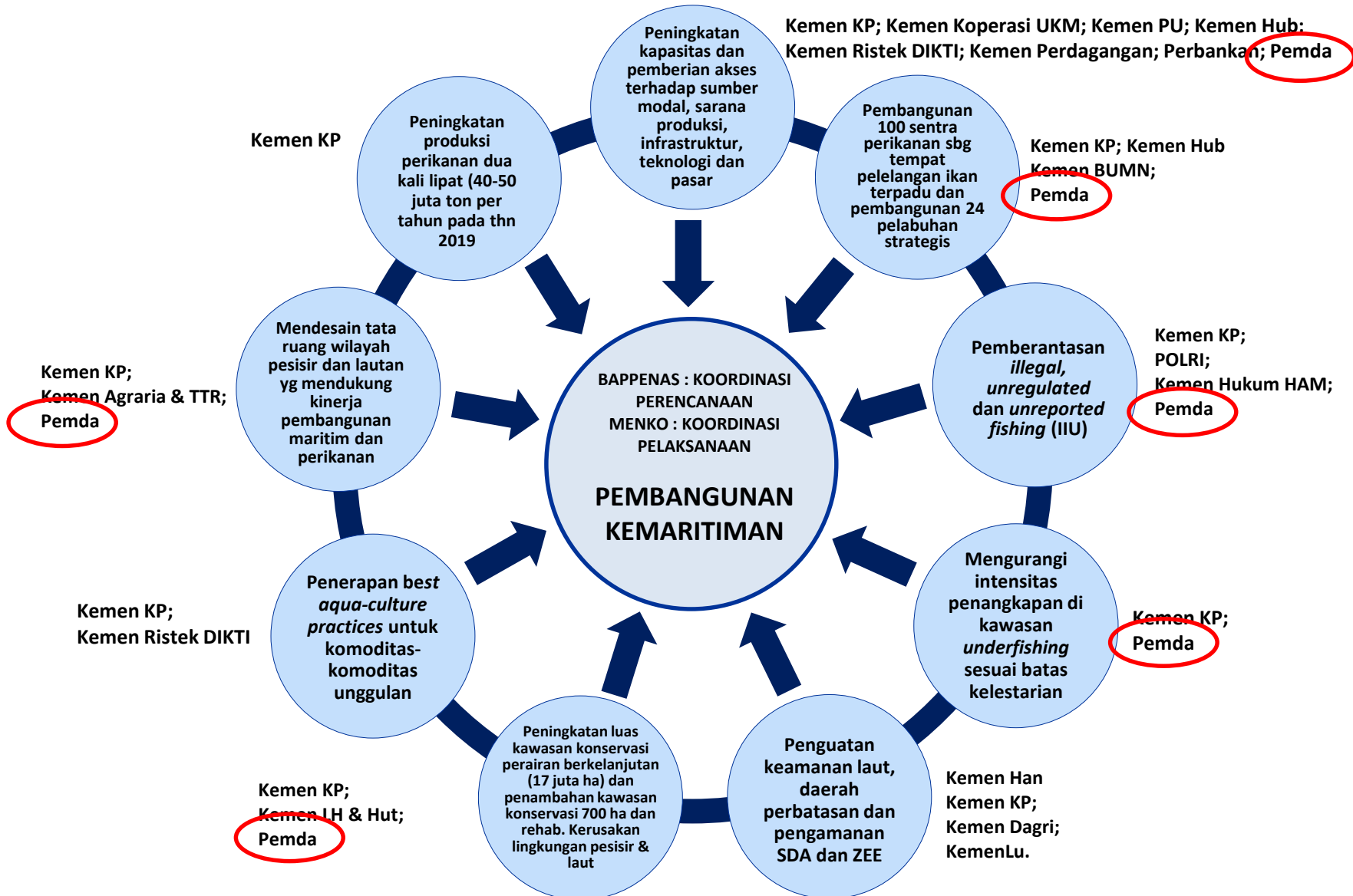
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)



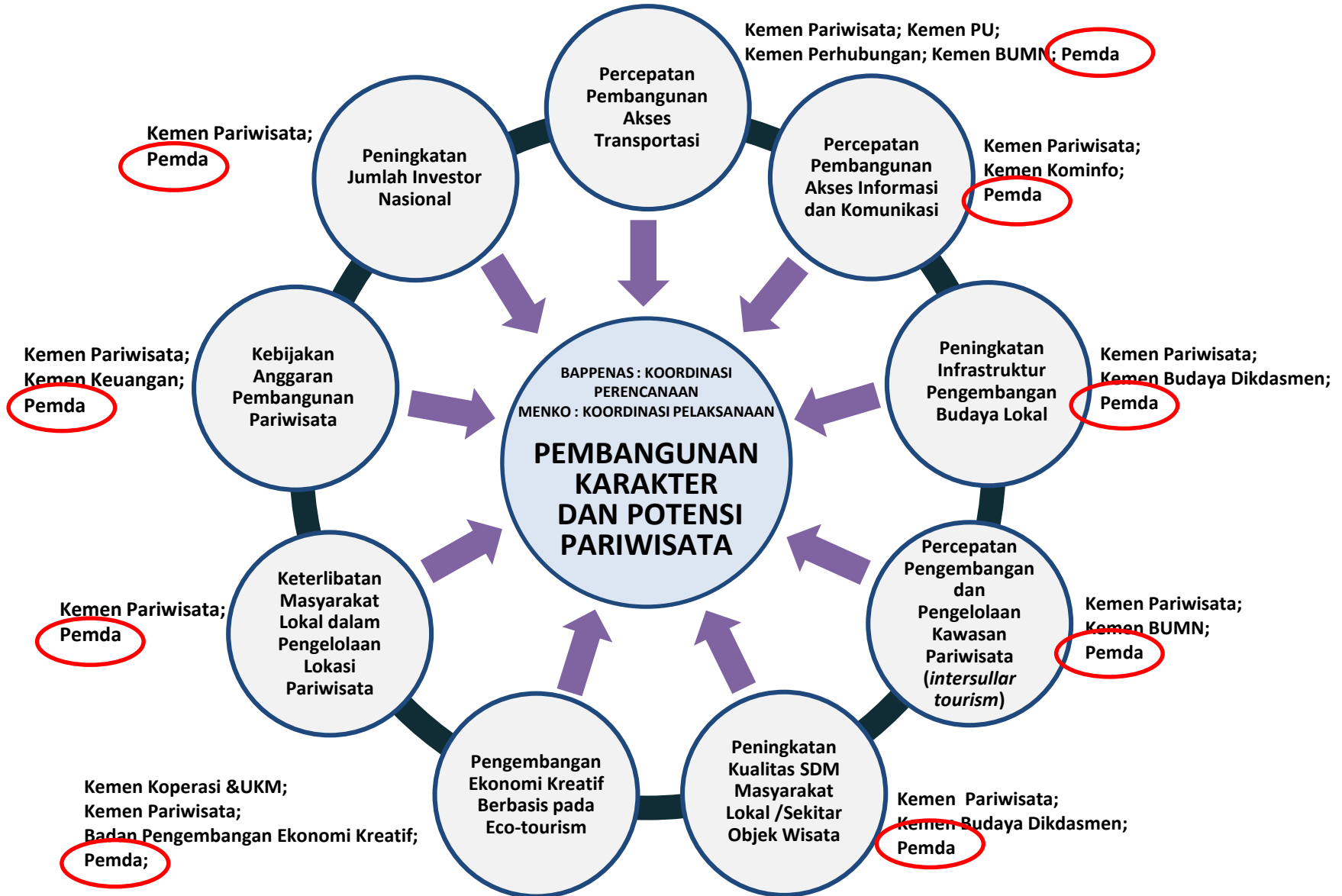
2. Kedaulatan Energi



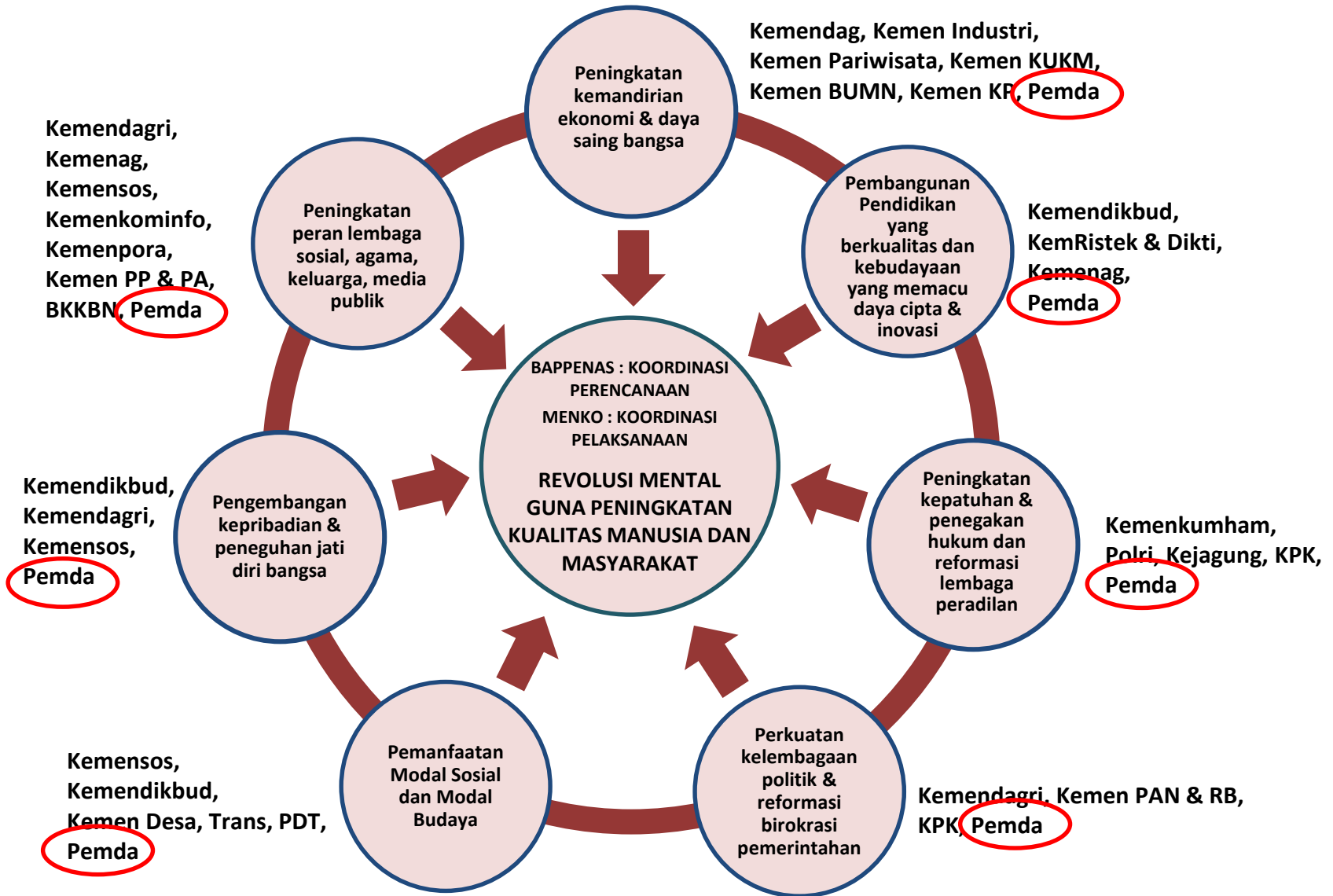
3. Kemaritiman



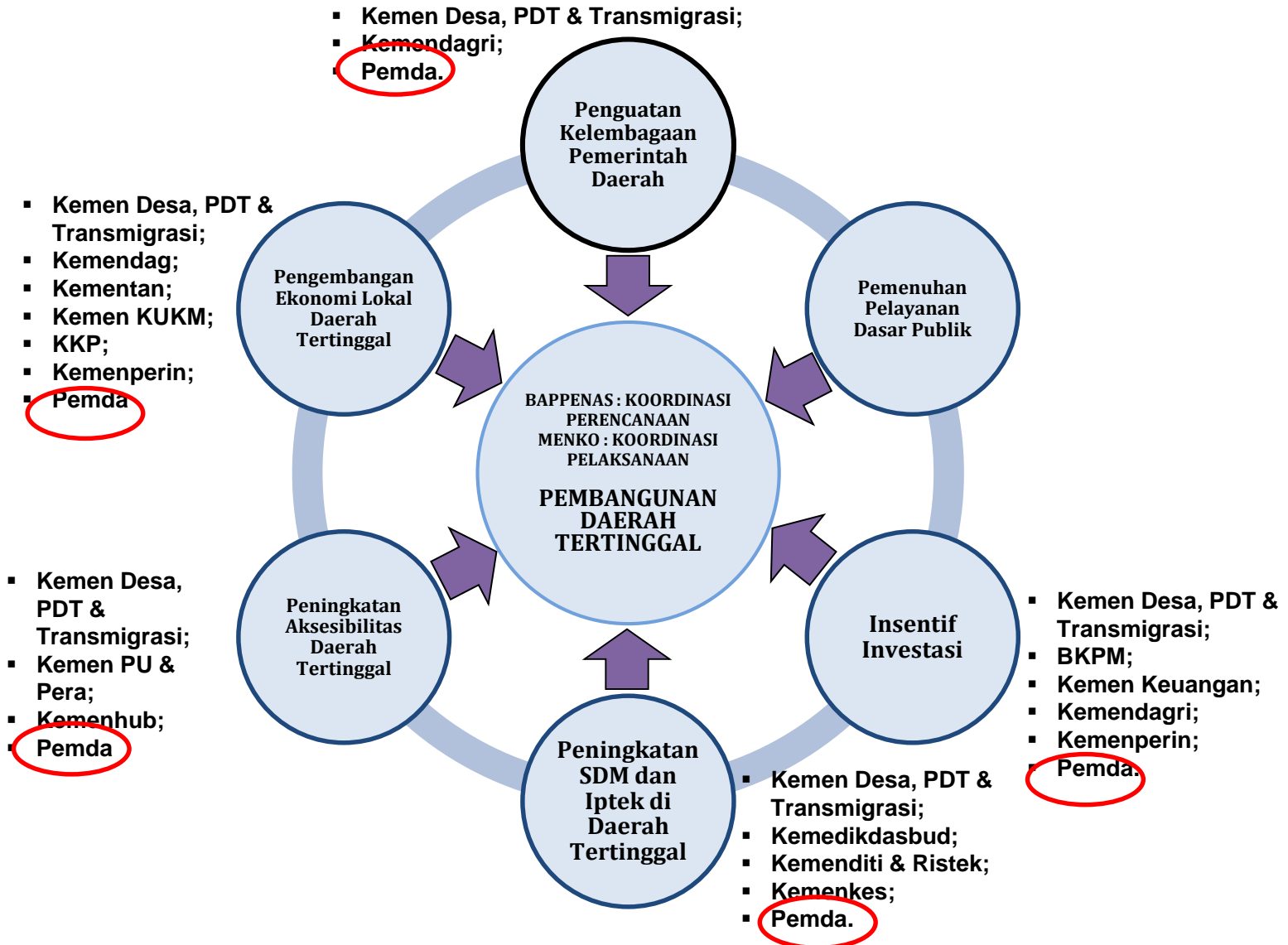
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



Pembangunan Daerah Tertinggal



A close-up photograph of a person's hands holding a white tablet. The tablet screen displays a business dashboard with various charts, including a bar chart and a pie chart, all in shades of blue. The text "Terima Kasih" is overlaid in large, white, bold letters with a black outline across the center of the screen. The background is blurred, showing a person in a light blue shirt.

Terima Kasih